

PENGEMBANGAN MODEL KEBIJAKAN ALOKASI ANGGARAN DAERAH BERORIENTASI KEADILAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Oleh : Baban Sobandi, SE. M.Si. *)

Sering kali pertumbuhan ekonomi dengan "keadilan" dijadikan dua dimensi yang secara teoritis dikontradiksikan. Tatkala diinginkan suatu pertumbuhan yang optimal kebijakan pemerintah, yang antara lain diwujudkan dalam kebijakan alokasi anggaran, seolah-olah harus mengorbankan dimensi "keadilan", dan sebaliknya jika dimensi "keadilan" ingin dikedepankan, maka pertumbuhan harus dikorbankan. Berbagai pendekatan dalam ekonomi regional dan ekonomi publik, seolah-olah mengatakan bahwa kondisi pareto-optimal dan interpersonal equity sulit untuk dicapai karena berbagai constraint yang ada. Satu hipotesis yang perlu diuji keabsahannya adalah, bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan sering kali bersifat sektoral atau spatial, dengan mengabaikan aspek personal. Dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan sekarang lebih menjawab "sektor apa dan di mana anggaran itu harus dialokasikan". Sementara pertanyaan "siapa yang harus menikmati bagian dari anggaran pemerintah tersebut" jarang dilakukan. Dampak dari pendekatan ini, maka keadilan dan pertumbuhan ekonomi sulit untuk diwujudkan secara simultan. Kajian ini dengan berbagai asumsinya, mencoba membuktikan hipotesis tersebut, dan menawarkan pengembangan alternatif sistem alokasi anggaran di masa yang akan datang.

Pendahuluan

Pembangunan daerah pada hakikatnya didasarkan pada pemikiran bahwa daerah secara keseluruhan adalah suatu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang secara integral merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem nasional. Pembangunan yang dilakukan di daerah-daerah pada dasarnya adalah juga pembangunan nasional. Atas dasar hal tersebut, muncul pendekatan pembangunan atas dasar sektor-sektor kegiatan tanpa memperhatikan lokasinya. Dalam

perkembangannya pendekatan tersebut dirasakan kurang lengkap, karena kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki kondisi dan potensi yang sama, sehingga muncul permasalahan kesenjangan (*inequity*) dan inefisiensi dalam pembangunan. Kesenjangan ini muncul karena pendekatan sektoral biasanya diawali dengan penetapan target nasional. Setelah target ditetapkan kemudian dipilih, di daerah mana saja kegiatan itu dilakukan. Biasanya yang dipilih adalah daerah-daerah yang mempunyai sumber daya (*factor endowment*)

*) Peneliti pada PKDA I dan Dosen pada STIA LAN Bandung

yang cocok untuk mencapai target tersebut. Dengan pendekatan ini, dapat terjadi daerah-daerah yang memiliki sumber daya sangat minim tetap tertinggal.

Masih dalam tataran konsepsi pembangunan nasional, muncul pendekatan yang lebih memperhatikan kondisi dan potensi setiap daerah dalam suatu negara tertentu, yaitu pendekatan pembangunan regional. Pendekatan regional, mempunyai strategi yang agak berbeda. Pendekatan ini umumnya didahului dengan meninjau sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang akan dikembangkan. Setelah sumber daya yang ada di daerah tersebut diketahui, kemudian dilakukan penelitian sektor mana saja yang dapat dikembangkan di daerah tersebut. Kedua pendekatan pembangunan ini masing-masing berorientasi kepada pertumbuhan (*growth*), dan pendekatan pemerataan (*equalization*).

Pendekatan pembangunan regional, pada babak selanjutnya terus berkembang dan menjadi perhatian baik di kalangan praktisi maupun di kalangan akademisi. Yang semula banyak didasarkan atas pertimbangan ekonomi belaka, kemudian diintegrasikan dengan perkembangan masyarakat yang makin menuntut kualitas dan kuantitas pelayanan dari pemerintah serta tuntutan kemandirian dan partisipasi pembangunan. Kini, masalah kebijakan pembangunan regional, tidak lagi hanya dikaitkan dengan masalah efisiensi dan pemerataan saja, melainkan pula dikaitkan dengan masalah pelayanan kepada masyarakat dan perkembangan aspirasi masyarakat tersebut.

Selanjutnya, dengan perkembangan konsep dan teori pembangunan regional yang tidak lagi hanya didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan ekonomi, melainkan memperhatikan aspek aspirasi masyarakat dan pelayanan, maka pembagian sumber keuangan yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan regional tersebut juga mengalami perubahan. Dalam hal ini perlu adanya sinkronisasi antara pembagian sumber keuangan dengan kewenangan pembiayaan antara berbagai tingkatan pemerintahan.

Dalam pengalokasian anggaran, secara normatif daerah diberikan keleluasaan. Untuk apa dan berapa daerah mengalokasikan anggarannya, tergantung kepada daerah masing-masing sesuai dengan keperluannya. Dalam pada itu, realita saat ini, belum ada suatu model baku yang mampu memberikan acuan kepada daerah dalam mengalokasikan anggaran yang dimilikinya, sehingga tidak jarang terjadi ketidaksinkronan dalam sasaran-sasaran pembangunan daerah. Artinya, tatkala daerah membuat kebijakan alokasi anggaran dengan orientasi pertumbuhan, maka pemerataan sering kali terabaikan. Sebaliknya, tatkala pemerintah daerah membuat kebijakan alokasi anggaran dengan orientasi pemerataan, maka dimensi pertumbuhan ekonomi daerah terabaikan.

Dalam hal lain pula, sering terjadi *trade off* antara efisiensi dengan pelayanan. Artinya, tatkala efisiensi menjadi prioritas, maka kualitas dan jangkauan layanan sering terabaikan. Demikian juga, tatkala jangkauan dan kualitas layanan menjadi prioritas, maka efisiensi sering terabaikan.

Atas dasar hal tersebut, maka pengembangan model alokasi anggaran yang berorientasi kepada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan, dan keseimbangan antara pelayanan kepada

masyarakat dengan efisiensi, perlu mendapat perhatian dan dikaji secara mendalam, sehingga daerah memiliki gagasan baru dalam mengalokasikan anggarannya, tidak hanya didasarkan kepada rutinitas dan pagu-pagu anggaran seperti biasanya.

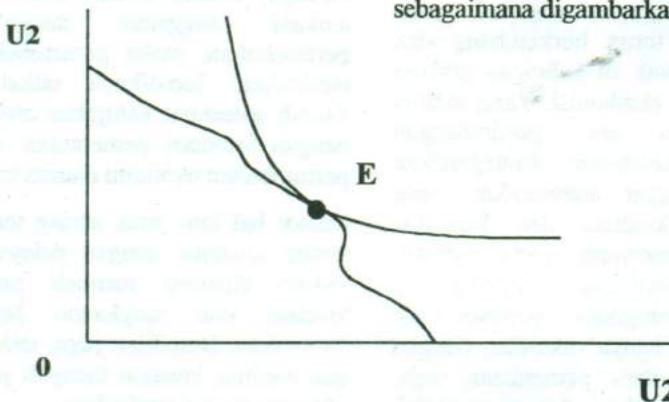
ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEADILAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari efisiensi penggunaan sumber daya. Artinya makin efisien penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, maka makin tinggi potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Kondisi efisiensi yang tinggi ini secara teoritis tercapai ketika peningkatan produksi suatu barang mengorbankan produksi barang lainnya, dan ketika peningkatan *utilitas* yang diterima oleh

seorang konsumen mengorbankan *utilitas* yang diterima oleh konsumen lainnya.

Dengan asumsi bahwa setiap penduduk dilahirkan dengan hak yang sama atas semua sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh suatu negara, maka keadilan dapat didekati dengan distribusi kesejahteraan. Artinya, kondisi adil identik dengan distribusi kesejahteraan yang relatif sama. Secara teoritik, konsepsi ini telah dikembangkan oleh Bergson dan Samuelson, yang terkenal dengan *Bergson-Samuelson Social Welfare*-nya, yang menggambarkan kurva kesejahteraan antar individu.

Optimalisasi efisiensi dan kesejahteraan terjadi pada titik singgung antara kurva *pareto-optimal condition* dengan kurva kesejahteraan (*welfare curve*). Itulah yang disebut dengan *The First Best Condition*, sebagaimana digambarkan berikut ini:

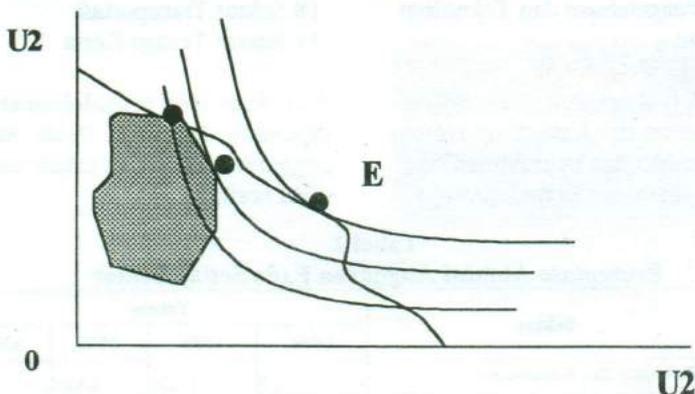


Karena berbagai kendala (*constrain*), maka kondisi *first-best* tidak selalu dapat dicapai. Kemungkinan yang terjadi adalah efisiensi. Keadaan ini dinamakan sebagai *pareto-optimal condition*. optimal namun kesejah-

teraan rendah, atau kesejahteraan lebih tinggi namun efisiensi tidak tercapai. Kendala-kendala tersebut antara lain: Distorsi pajak dan transfer, monopoli, *asymetric information*, dan lain-lain.

Tugas pemerintah dalam hal ini adalah bagaimana mengatasi berbagai kendala tersebut melalui kebijakan fiskalnya.

Kalaupun pemerintah tidak mampu mencapai efisiensi. Secara diagramatis dapat dilihat sebagai berikut:



Sebagaimana terlihat pada gambar, karena berbagai kendala, maka kemungkinan yang terjadi adalah E_1 atau E_2 . Tugas pemerintah melalui kebijakan fiskalnya adalah mendorong E_1 atau E_2 tersebut agar mencapai E atau paling tidak, menempatkan kondisi keseimbangan pada titik E_2 bukan pada E_1 . Atas dasar hal tersebut, kajian ini akan mencoba mencari model kebijakan fiskal yang mampu mendorong kepada keseimbangan E atau E_2 .

first best condition, paling tidak pemerintah harus memilih *the second best condition* sebagai pilihan kedua, yaitu dengan lebih mengutamakan kesejahteraan daripada

-hanakan analisis, sektor-sektor pengalokasian anggaran dikategorikan ke dalam dua kategori besar dilihat dari besarnya alokasi anggaran setiap tahun, yaitu *Sektor Unggulan* dan *Sektor Non Unggulan*. Sektor Unggulan adalah sektor-sektor yang mendapatkan alokasi besar (lebih dari 10% dari total anggaran pembangunan). Sedangkan Sektor Non Unggulan didefinisikan sebagai sektor-sektor yang mendapatkan alokasi kecil (kurang dari 10% dari total anggaran). Sektor-sektor yang masuk ke dalam setiap kategori dimungkinkan berubah, sesuai dengan besarnya alokasi anggaran pada tahun yang bersangkutan.

DAMPAK POLA ALOKASI ANGGARAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (KASUS JAWA BARAT)

Alokasi anggaran didefinisikan sebagai pendistribusian anggaran setiap tahun terhadap sektor - sektor. Untuk menyeder

Terdapat 19 sektor pengalokasian anggaran, di Propinsi Jawa Barat yaitu sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian dan Kehutanan
2. Sektor Pertambangan dan Energi
3. Sektor Industri
4. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi
5. Sektor Pembangunan Daerah

6. Sektor Lingkungan Hidup
7. Sektor Perdagangan dan Koperasi
8. Sektor Agama
9. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
10. Sektor Hukum
11. Sektor Aparatur Pemerintah
12. Sektor Politik, Penerangan & Komukasi
13. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum
14. Sektor Perumahan dan Pemukiman
15. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

16. Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan
17. Sektor Kependidikan dan Keluarga Sejahtera
18. Sektor Transportasi
19. Sektor Tenaga Kerja

Atas dasar data pengalokasian anggaran yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, alokasi anggaran pada setiap sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Prosentase Alokasi Anggaran Pada Setiap Sektor

No	Sektor	Tahun			
		1998	1999	2000	2001
1.	Pertanian dan Kehutanan	7,12	16,26	20,26	8,40
2.	Pertambangan dan Energi	1,13	0,22	0,39	0,14
3.	Industri	0,62	0,50	0,87	0,49
4.	Pariwisata dan Telekomunikasi	1,34	1,38	1,61	1,39
5.	Pembangunan Daerah	1,40	23,45	34,42	19,40
6.	Lingkungan Hidup	2,07	1,13	0,85	0,74
7.	Perdagangan dan Koperasi	32,62	1,64	0,49	0,41
8.	Agama	0,65	0,71	2,71	0,44
9.	Ilmu Pengetahuan dan Tehng.	1,49	0,46	0,52	0,63
10.	Hukum	0,38	0,30	0,13	0,21
11.	Aparatur Pemerintah	8,02	10,56	5,52	7,45
12.	Pol.,Penerangan & Komukasi	1,04	0,31	0,44	0,53
13.	Keamanan dan Tibum	0,50	0,53	0,39	0,29
14.	Perumahan dan Pemukiman	0,70	0,39	0,38	0,35
15.	Pendidikan dan Kebudayaan	7,50	9,13	7,15	6,32
16.	Kesehatan dan Kesejahteraan	8,60	8,77	3,33	18,94
17.	Kependdkan dan Klg. Sejahtra	0,61	8,77	3,33	18,94
18.	Transportasi	23,08	13,85	16,12	13,88
19.	Tenaga Kerja	1,15	1,65	1,12	1,04
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00
	Total Anggaran Pembangunan	639.555,99	917.770,96	1.159.104,96	2.222.994,47

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana pada tabel di atas, nampak terdapat beberapa sektor unggulan menurut daerah, sehingga mendapatkan alokasi dana terbesar. Sektor-sektor beserta prosentase alokasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

1. Pada tahun 1998, sektor unggulan ditempati oleh Sektor Perdagangan dan Koperasi serta Sektor Transportasi, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar 55,62%.
2. Pada tahun 1999 sektor unggulan ditempati oleh 4 sektor yaitu Sektor Pembangunan Daerah, Sektor Pertanian dan Kehutanan, Sektor Transportasi, dan Sektor Aparatur Pemerintah, dengan total alokasi anggaran pembangunan sebesar 64,12%;
3. Pada tahun 2000, yang dianggap sektor unggulan oleh Pemerintah Propinsi adalah Sektor Pembangunan Daerah, Sektor Pertanian dan Kehutanan, dan Sektor Transportasi, dengan total alokasi anggaran pembangunan sebesar 70,80%;

4. Pada tahun 2001, sektor unggulan meliputi Sektor Pembangunan Daerah, Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan, Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, serta Sektor Transportasi, dengan total alokasi anggaran pembangunan sebesar 71,16%.

Sementara itu, secara total laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat adalah -18,74% pada tahun 1998, meningkat menjadi 3,43% pada Tahun 1999, meningkat lagi menjadi 5,26% pada Tahun 2000, turun menjadi 4,06% pada tahun 2001, dan meningkat lagi menjadi 4,10% pada tahun 2002. Dengan asumsi terdapat lag (senggang waktu) 1 (satu) tahun untuk implikasi kebijakan alokasi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi, maka hubungan antara kebijakan alokasi anggaran dengan penetapan sektor unggulannya terhadap laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Dampak Pola Alokasi Anggaran Terhadap
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Sektor Unggulan	Prosentase Alokasi Anggaran (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
1998	1. Sektor Unggulan (<i>Perdagangan dan Koperasi, Transportasi</i>)	55,62	-18,74
	2. Non Sektor Unggulan	44,38	
1999	1. Sektor Unggulan (<i>Pertanian dan Kehutanan, Pembangunan Daerah, Aparatur Pemerintah, dan Transportasi</i>)	64,12	3,42
	2. Non Sektor Unggulan	35,88	
2000	1. Sektor Unggulan (<i>Pertanian dan Kehutanan, Pembangunan Daerah, dan Transportasi</i>)	70,80	5,26
	2. Non Sektor Unggulan	29,20	
2001	1. Sektor Unggulan (<i>Pembangunan Daerah, Kesehatan dan Kesejahteraan, Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, dan Transportasi</i>)	71,16	4,06
	2. Non Sektor Unggulan	28,84	
2002			4,10

Sumber: BPS dan BI, tabel-tabel sebelumnya, diolah.

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 1998 pada saat krisis ekonomi masih berlangsung, pemerintah menjadikan Sektor Perdagangan dan Koperasi sebagai sektor unggulan. Kebijakan ini sejalan dengan

kebijakan Pemerintah Pusat yang mengencangkan berbagai program JPS yang sebagian besar dananya dialokasikan melalui media sektor koperasi. Hal ini bisa dijelaskan secara teoritis, bahwa sektor ini banyak melibatkan

masyarakat dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil sehingga sebagian besar pendapatannya tersebut dikonsumsi. Akibatnya, permintaan meningkat tajam, yang direspon dengan meningkatnya sektor produksi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi pun terdongkrak dari -18,74% pada Tahun 1998 menjadi 3,42% pada tahun 1999.

Kebijakan alokasi anggaran dengan menempatkan Sektor Pertanian dan Kehutanan serta Sektor Pembangunan Daerah sebagai sektor unggulan pada Tahun 1999 mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi dari 3,42% menjadi 5,26% pada Tahun 2000. Kenyataan ini dapat dijelaskan bahwa Sektor Pertanian dan Kehutanan serta Sektor Pembangunan Daerah dalam realita banyak menyentuh masyarakat golongan ekonomi lemah yang notabene mempunyai pola konsumsi dengan marginal propensity to consume cukup besar, sehingga multiplier effect setiap pengeluaran pemerintah menjadi besar. Akibatnya, daya dorong terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya pun menjadi lebih besar.

Pada Tahun 2000 kebijakan alokasi anggaran menempatkan Sektor Pertanian dan Kehutanan, Sektor Pembangunan Daerah, dan Sektor Transportasi sebagai sektor unggulan. Dua sektor pertama secara langsung menyentuh masyarakat banyak yang mempunyai tingkat pendapatan relatif rendah, sehingga diharapkan mampu mendorong permintaan yang pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, pada Tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,06%. Meskipun menurun dari laju pertumbuhan tahun sebelumnya, namun masih dalam angka yang positif cukup tinggi.

Pada Tahun 2001 kebijakan alokasi anggaran memprioritaskan 4 sektor, yaitu Sektor Pembangunan Daerah, Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan, Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, dan Sektor Transportasi. Tiga sektor pertama pada Tahun 2001 merupakan sektor yang banyak menyentuh langsung masyarakat banyak dengan harapan disamping dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, juga mampu memberikan efek multiplier yang cukup besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, pada Tahun 2002 laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 4,10% naik 0,04% dari tahun sebelumnya.

DAMPAK POLA ALOKASI ANGGARAN TERHADAP PEMERATAAN ANTAR SEKTOR DAN ANTAR INDIVIDU

Kebijakan alokasi anggaran pembangunan juga diarahkan untuk menciptakan keadilan. Salah satu indikator keadilan adalah tingkat disparitas atau kesenjangan baik kesenjangan antar individu, antar daerah, antara desa dan kota, maupun kesenjangan antar sektor. Sehubungan dengan berbagai keterbatasan terutama data dan informasi, maka indikator kesenjangan atau ketidakmerataan dalam kajian ini diambil tingkat disparitas Produk Domestik Bruto antar sektor sebagai indikator tingkat ketimpangan antar sektor, dan tingkat pengangguran sebagai indikator tingkat ketimpangan antar individu.

Tingkat disparitas antar sektor diukur dengan besarnya standar deviasi dari nilai produksi antar sektor. Makin besar standar deviasi nilai produksi antar sektor makin tidak merata pendapatan dan makin tidak adil. Sementara

itu, indikator tingkat pengangguran diinterpretasi bahwa semakin besar tingkat pengangguran semakin banyak masyarakat yang tidak mendapatkan penghasilan dan semakin

tinggi tingkat kesenjangan antar individu yang berarti pula makin tidak adil. Hasil perhitungan dengan menggunakan data-data sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Dampak Pola Alokasi Anggaran Terhadap
Tingkat Pemerataan Antar Sektor

THN	Sektor Unggulan	Prosentase Alokasi Anggaran (%)	Pemerataan	
			Tingkat Pengangguran	Disparitas Antar Sektor
1998	Sektor Unggulan (<i>Perdagangan dan Koperasi Transportasi</i>) Non Sektor Unggulan	55,62 44,38	4,52	6.330.133,906
1999	Sektor Unggulan (<i>Pertanian dan Kehutanan, Pembangunan Daerah, Aparatur Pemerintah, dan Transportasi</i>) Non Sektor Unggulan	64,12 35,88	8,04	6.431.617,745
2000	Sektor Unggulan (<i>Pertanian dan Kehutanan, Pembangunan Daerah, dan Transportasi</i>) Non Sektor Unggulan	70,80 29,20	8,42	6.440.217,777
2001	Sektor Unggulan (<i>Pembangunan Daerah, Kesehatan dan Kesejahteraan, Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, dan Transportasi</i>) Non Sektor Unggulan	71,16 28,84	6,61	6.763.257,398
2002			15,18	6.943.427,144

Catatan:

- Pertumbuhan daya serap tenaga kerja sebagai indikator peningkatan atau penurunan pemerataan
- Disparitas antar sektor diukur dengan standar deviasi nilai PDRB sektoral, sebagai indikator tingkat pemerataan antar sektor

Data pada tabel di atas menjelaskan bahwa kebijakan alokasi anggaran berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan baik ketimpangan antar sektor maupun ketimpangan antar individu. Pada Tahun 1998 kebijakan alokasi anggaran yang menempatkan Sektor Perdagangan dan Koperasi serta Sektor Transportasi sebagai sektor unggulan tidak mampu menurunkan tingkat pengangguran maupun disparitas antar sektor. Dengan kata lain, pendekatan sektoral yang diterapkan dalam kebijakan alokasi anggaran Tahun 1998 menyebabkan meningkatnya pengangguran dari 4,52% pada tahun tersebut menjadi 8,04% pada Tahun 1999. Demikian juga disparitas antar sektor meningkat dari Rp. 6,330 Juta pada Tahun 1998 menjadi Rp. 6,431 Juta pada Tahun 1999. Ini berarti kebijakan alokasi anggaran di satu sisi mampu memacu pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain meningkatkan ketimpangan antar individu dan ketimpangan antar sektor.

Pada Tahun 1999 kebijakan alokasi anggaran menempatkan Sektor Pertanian dan Kehutanan serta Sektor Pembangunan Daerah sebagai sektor unggulan, juga tidak mampu mengatasi masalah pengangguran dan ketimpangan antar sektor. Implikasi kebijakan pada tahun tersebut berimplikasi kepada ketimpangan pada tahun berikutnya. Tingkat pengangguran meningkat dari 8,04% pada Tahun 1999 menjadi 8,42% pada Tahun 2000. Sedangkan disparitas antar sektor dengan indikator standar deviasi meningkat dari Rp. 6,431 Juta pada Tahun 1999 menjadi Rp. 6,440 Juta pada Tahun 2000. Jadi, pada tahun ini kebijakan alokasi anggaran dengan pendekatan sektoral masih tetap memperlebar kesenjangan antar sektor dan kesenjangan antar individu dalam masyarakat.

Pada Tahun 2000, dengan menempatkan Sektor Pertanian dan Kehutanan, Sektor Pembangunan Daerah, dan Sektor Transportasi sebagai sektor unggulan, di satu sisi mampu mengurangi kesenjangan antar individu yang ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran dari 8,42% pada tahun tersebut menjadi 6,61% pada tahun berikutnya (2001). Sementara itu, disparitas antar sektor masih tetap makin melebar yang ditandai dengan meningkatnya standar deviasi dari Rp. 6,440 Juta pada Tahun 2000 menjadi Rp. 6,763 Juta pada Tahun 2001.

Berkurangnya tingkat pengangguran sebagai indikator penurunan ketimpangan antar individu dapat difahami karena pada tahun 2000 kebijakan alokasi anggaran memang mengunggulkan dua sektor yang banyak menyentuh masyarakat banyak yaitu Sektor Pembangunan Daerah dan Sektor Pertanian dan Kehutanan. Pada kedua sektor tersebut diduga terdapat sejumlah besar masyarakat yang tersebut.

Ketimpangan antar individu dan ketimpangan antar sektor pada Tahun 2002 nampaknya melonjak lagi masing-masing menjadi 15,18% dan Rp. 6,943 Juta. Kondisi ini sedikit banyak merupakan dampak dari kebijakan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya yang menempatkan Sektor Pembangunan Daerah, Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan, Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, serta Sektor Transportasi sebagai sektor unggulan. Meskipun keempat sektor tersebut menyentuh masyarakat banyak, namun jika dilihat dari karakter sektor-sektor tersebut ternyata merupakan sektor-sektor yang tidak banyak menyerap

tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran melonjak. Sementara itu disparitas antar sektor, meskipun mengalami peningkatan namun tidak terlalu melonjak.

KESIMPULAN

Kebijakan alokasi anggaran yang diterapkan saat ini lebih menggunakan pendekatan sektoral, dengan sektor-sektor unggulannya. Pendekatan tersebut ternyata tidak mampu menyelaraskan antara laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pemerataan. Dalam kaitan ini, pendekatan sektoral mampu memacu pertumbuhan ekonomi secara makro, namun di sisi lain ketimpangan antar individu dan ketimpangan antar sektor makin meningkat.

Namun demikian, meskipun secara umum kebijakan alokasi anggaran tidak mampu

menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara bersamaan, namun dalam kasus kebijakan tertentu nampak bahwa tat kala kebijakan alokasi anggaran lebih diorientasikan kepada sektor-sektor yang banyak menyentuh masyarakat banyak dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah, nampak memberikan efek yang lebih baik. Dalam hal ini laju pertumbuhan ekonomi tetap positif dan disparitas antar sektor dan antar individu peningkatannya juga tidak terlalu tajam. Kenyataan ini dapat difahami karena, alokasi anggaran yang menyentuh masyarakat banyak dengan tingkat pendapatan relatif kecil disamping mengurangi disparitas secara langsung, juga menimbulkan efek multiplier yang besar sehingga laju pertumbuhan ekonomi pun relatif tinggi. Secara ringkas, dampak kebijakan alokasi anggaran yang lebih mengedepankan pendekatan sektoral tersebut dapat diikuti pada matriks di bawah

Matriks Deskripsi Kualitatif Dampak Pola Alokasi Anggaran Terhadap Pertumbuhan dan Pemerataan

Alokasi Anggaran	Dampak Terhadap Laju Pertumbuhan	Dampak Terhadap Ketidakmerataan	
		Tingkat Pengangguran	Disparitas Antar Sektor
Pendekatan Sektoral, dengan menetapkan sektor unggulan terdiri dari Sektor Perdagangan dan Koperasi, serta Sektor Transportasi	Positif, dan meningkat sangat tinggi	Meningkat besar	Meningkat kecil (<i>makin tidak merata</i>)
Pendekatan Sektoral, dengan menetapkan sektor unggulan terdiri dari Sektor Pertanian dan Kehutanan, Pembangunan Daerah, Aparatur Pemerintah, dan Sektor Transportasi.	Positif, dan meningkat sedang	Meningkat kecil	Meningkat kecil

Pendekatan Sektorial, dengan menetapkan sektor unggulan terdiri dari Sektor <i>Pertanian dan Kehutanan, Pembangunan Daerah, dan Sektor Transportasi</i>	Positif, dan turun sedang	Menurun besar	Meningkat kecil
Pendekatan Sektorial, dengan menetapkan sektor unggulan terdiri dari Sektor <i>Pembangunan Daerah, Kesehatan dan Kesejahteraan, Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, serta Sektor Transportasi.</i>	Positif, dan meningkat kecil	Meningkat besar	Meningkat kecil

Atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa makin miskin masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan alokasi anggaran dan makin banyak jumlah masyarakat yang tersentuh secara langsung, maka makin besar pula dampaknya terhadap keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan disparitas atau ketimpangan.

REKOMENDASI

Atas dasar hasil penelitian ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jika kondisi riil identik dengan asumsi yang diajukan maka, kelompok masyarakat yang disentuh oleh kebijakan alokasi anggaran sangat menentukan pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan (peningkatan keadilan). Dengan demikian, maka pada masa yang akan datang, perlu dikembangkan kebijakan alokasi anggaran dengan pendekatan orang (personal) bukan pendekatan sektor dan spatial saja.

2. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan mengurangi berbagai asumsi yang dijukan pada kajian ini. Lokus kajian ditempatkan pada Daerah Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia Bandung, *Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Jawa Barat dan Banten Vol 3 No.4*, Bandung, 2003
-, *Triwulan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Jawa Barat Triwulan I-2003*, Bandung.
- Biro Pusat Statistik, *Jawa Barat Dalam Angka 1998-2002*, Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Bandung, 1998 s.d. 2002.
- Hera Susanti, Moh. Ikhsan, dan Widyanti, *Indikator-Indikator Makro Ekonomi*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 1995.
- Sutyastie Soemitro, dkk., *Analisis Ekonomi Jawa Barat*, Unpad Press, Bandung, 2003.